

Efektivitas Penerapan Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak

Stefanus Sampe

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Sam Ratulangi - Manado
stefanus_sampe@unsrat.ac.id

Diterima: 08-12-2022

Direview: 06-02-2023

Disetujui: 09-03-2023

Abstrak

Subsidi bahan bakar minyak menjadi alternatif utama pemerintah di negara-negara berkembang khususnya negara-negara pengekspor bahan bakar minyak untuk memperkuat pembangunan industrial dalam negeri. Dengan subsidi ini bahan bakar minyak dapat diakses oleh masyarakat luas dengan harga yang relatif murah dan dapat menggerakkan berbagai bisnis. Meskipun demikian, pemberian subsidi ini ternyata menimbulkan masalah dalam distribusi kesejahteraan. Studi ini bertujuan untuk menunjukkan efek-efek negatif dari subsidi bahan bakar ini dengan menggunakan metode kualitatif. Kebijakan subsidi bahan bakar minyak harus ditinjau kembali karena tidak tepat sasaran untuk membantu masyarakat miskin, menimbun stok BBM, kelangkaan stok BBM di pasar domestik dan harga BBM yang tidak stabil di dalam negeri yang pada akhirnya mengganggu berbagai kegiatan bisnis.

Kata Kunci: *Konsumsi; Penawaran; Permintaan; Produsen; Subsidi*

Abstract

Fuel oil subsidies are the main alternative for governments in developing countries, especially fuel-exporting countries, to strengthen domestic industrial development. Through this subsidy policy, fuel oil can be accessed by the wider community at a relatively low price and can encourage various businesses. However, the implementation of this subsidy policy leads to problems in the distribution of welfare. This study aims to demonstrate the negative effects of the fuel subsidy policy using qualitative methods. The fuel subsidy policy must be reviewed because it is not on target to help the poor, hoarding fuel stocks, scarcity of fuel stocks in the domestic market, and unstable fuel prices in the country which ultimately disrupt various business activities.

Keywords: *Consumption; Demand; Producer; Subsidy; Supply*

Pendahuluan

Konflik Rusia-Ukraina telah memberikan dampak terhadap stabilitas perekonomian di seluruh dunia. Perang yang terjadi sejak Februari 2014 ini dan memuncak dengan invasi Rusia ke wilayah Ukraina pada Februari 2022 lalu telah menyebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan pangan dunia. Meskipun kedua negara ini hanya menyumbang sedikit dalam ekonomi global, dimana Rusia hanya menyumbang 1,6 persen dan Ukraina sebesar 0,2 persen dari total produksi dunia pada tahun 2022, tetapi keduanya merupakan produsen dan eksportir utama energi dan pangan dunia (Liadze, Macchiarelli, Mortimer-Lee, Juanino, 2022:3). Kenaikan harga energi dan pangan serta penjatuhan sanksi internasional kepada Rusia terhadap invasinya ke Ukraina ini memberikan efek domino terhadap perekonomian bahkan menghantam pasar-pasar keuangan dan melemahkan kepercayaan untuk berinvestasi.

Perang Rusia-Ukraina telah mempengaruhi perekonomian Indonesia. Bagi Indonesia kenaikan harga energi dan pangan sebagai akibat dari perang Rusia-Ukraina ini telah memberikan efek positif terhadap ekspor komoditas non-migas khususnya batu bara dan minyak sawit mentah (CPO). Menurut BPS, nilai ekspor Indonesia pada Maret 2022 naik 29,42 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan 44,36 persen dibandingkan periode yang sama pada 2021 (year-on-year) sehingga terjadi kenaikan ekspor sebesar US\$ 26,5 miliar (CNBC Indonesia, 2022). Meskipun demikian, perang Rusia-Ukraina ini juga memberikan dampak negatif terhadap perekonomian dalam negeri Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) telah memicu kenaikan harga barang dan jasa lain. Mengingat bahwa BBM merupakan komoditi primer dan penggerak aktivitas produksi.

Untuk membuat kenaikan harga BBM ini tidak terlalu membebankan masyarakat, pemerintah mengambil kebijakan menambah anggaran subsidi BBM. Meskipun demikian, kebijakan subsidi BBM

yang dijalankan oleh pemerintah ternyata menyebabkan perdebatan sengit tentang efektivitas kebijakan tersebut untuk menyediakan BBM kepada orang miskin dengan harga rendah. Beberapa orang mengatakan bahwa pemerintah perlu memberikan subsidi minyak bumi untuk melindungi orang miskin. Di sisi lain, sebagian orang mengatakan bahwa subsidi minyak bumi tidak secara efektif melindungi orang miskin karena orang kaya dapat memanfaatkan harga minyak bumi yang rendah dan menyebabkan kelangkaan minyak bumi yang dapat meningkatkan harga minyak bumi di pasar domestik.

Tulisan ini berpendapat bahwa subsidi minyak bumi berdampak negatif terhadap harga minyak dan distribusi di dalam negeri dan harus diubah karena tidak tepat sasaran untuk mendukung masyarakat miskin, harga minyak bumi yang tidak stabil di dalam negeri, penimbunan stok minyak bumi yang dilakukan oleh agen pengganggu, dan kelangkaan stok minyak bumi di pasar domestik.

Esai ini memiliki struktur sebagai berikut untuk mendukung pernyataan di atas: Pertama, definisi subsidi; kedua, subsidi minyak bumi di Indonesia; ketiga, pengaruh subsidi minyak bumi terhadap produsen; keempat, pengaruh subsidi BBM terhadap konsumen yang menyebabkan subsidi BBM tidak tepat sasaran untuk menghidupi masyarakat miskin, menimbun stok BBM, kelangkaan stok BBM di pasar domestik dan harga BBM yang tidak stabil di dalam negeri.

Tinjauan Pustaka

Menurut McTaggart, et al., "*Subsidies, which are payments by the government to producers, decrease the prices paid by buyers and increase the prices received by sellers. Subsidies increase the quantity produced.*" (Subsidi yang merupakan pembayaran oleh pemerintah kepada produsen, menurunkan harga yang dibayar pembeli dan menaikkan harga yang diterima penjual. Subsidi meningkatkan kuantitas yang diproduksi) (1999:6.11). Subsidi adalah intervensi yang tidak langsung dari pemerintah ke pasar melalui penyediaan anggaran untuk menanggung sebagian harga yang harus dibayar konsumen untuk barang atau jasa tertentu. Pemerintah harus mengintervensi pasar karena ada kegagalan mekanisme pasar untuk mendistribusikan sumber daya di pasar domestik. Menurut Gans, et al., 'kegagalan pasar adalah ketidakmampuan beberapa pasar yang tidak diatur untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien' (1999: 148). Dengan subsidi pemerintah berharap produsen dapat menjual produknya dengan harga subsidi yang lebih tinggi dari harga pasar serta konsumen dapat membeli produk dengan harga subsidi yang lebih murah dari

harga pasar. Lebih lanjut lagi, dikatakan oleh Huili Zhang, Ran An dan Qinlin Zhong (2019) bahwa subsidi merupakan bagian penting dari pengeluaran fiskal yang umum bagi semua negara di mana pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada usaha individu dalam memproduksi atau mengkonsumsi produk atau jasa untuk mencapai tujuan politik dan ekonomi tertentu. Subsidi ini dilakukan oleh pemerintah khususnya di negara-negara berkembang untuk melindungi orang-orang miskin (Dennis 2016; World Bank 2009). Sebagai contoh subsidi minyak bumi dijalankan oleh pemerintah agar masyarakat khususnya yang kurang mampu dapat membeli bahan bakar minyak dengan harga subsidi yang lebih murah. Harga bersubsidi dapat menjamin bahwa konsumen memiliki kekuatan untuk membeli minyak bumi dan produsen tetap memproduksi minyak bumi.

Kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia sudah dijalankan sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Kebijakan subsidi BBM selama pemerintahan Presiden Soeharto tidak menjadi masalah besar dikarenakan Indonesia waktu itu merupakan salah satu pengeksport minyak bumi terbesar sehingga dapat mempengaruhi harga pasar minyak dunia (Rahman, Dargusch, Wadley, 2021:5). Setelah pemerintahan Soeharto, kebijakan subsidi minyak menjadi perdebatan sengit untuk dijalankan (Ichsan, Lockwood dan Ramadhani, 2022). Terlebih lagi setelah tahun 2003 Indonesia bukan lagi menjadi eksportir minyak dan harga minyak sangat fluktuatif mengikuti situasi politik dunia. Sejak tahun 2000 tercatat sudah 14 kali dilakukan reformasi subsidi minyak bumi oleh pemerintah sampai saat ini (Chelminksi, 2018). Meskipun menimbulkan kontroversi, subsidi minyak bumi ini masih tetap dipertahankan sampai saat ini (Ichsan, Lockwood, Ramadhani, 2022).

Minyak bumi merupakan produk pokok di Indonesia. Meskipun kebutuhan energi sebagian besar rumah tangga sudah beralih dari minyak tanah ke gas, konsumsi minyak bumi masih tergolong tinggi di Indonesia. Konsumsi minyak bumi yang terbesar berada di sektor industri (40 persen) dan perhubungan (30 persen) pada tahun 2019, sedangkan konsumsi untuk rumah tangga hanya 16 persen di tahun 2019 (APEREC, 2022: 90-91). Lebih lanjut lagi, menurut Asian Pacific Energy Research Center (APEREC), di Indonesia minyak bumi merupakan bahan bakar yang paling disukai yaitu 46 persen dari seluruh konsumsi energi pada tahun 2019. Batubara adalah yang paling disukai kedua yang tercatat sebesar 26 persen dan diikuti oleh listrik (14 persen), gas (8 persen) dan energi terbarukan (6 persen) (2022:91-92). Apalagi sebagian besar

industri rumah tangga dan industri kecil di Indonesia menggunakan energi yang dibakar oleh minyak bumi. Jadi, minyak bumi masih merupakan sumber energi yang sangat penting di Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan minyak bumi di dalam negeri dengan harga terjangkau, pemerintah melalui perusahaan negara, Pertamina (Persero), memasok minyak bumi. Pertamina awalnya merupakan produsen tunggal minyak bumi yang memonopoli pasokan serta distribusi minyak bumi di Indonesia bahkan sampai menguasai pasar ekspor minyak bumi dunia sehingga Indonesia bisa menjadi ketua dari negara-negara pengekspor minyak (OPEC). Cikal bakal perusahaan ini sudah dimulai sejak tahun 1950-an yang kemudian berubah menjadi bentuk perusahaan seperti saat ini sejak 1968. Namun demikian, sejak awal tahun 2000-an peran Pertamina sebagai pengekspor ini berubah menjadi pengimpor minyak bumi. Pertamina harus menjaga produksi minyak bumi tersedia di pasar domestik.

Metodologi

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Suatu rancangan penelitian kualitatif secara khusus cocok untuk menginvestigasi sekaligus mengevaluasi kebijakan pemerintah mengenai pemberian subsidi bahan bakar minyak. Design penelitian kualitatif ini juga menggunakan pendekatan interpretatif untuk mengartikulasikan pandangan bahwa realitas adalah subyektif dan bahwa persepsi-persepsi tentang realitas tersebut berbedabagi tiap-tiap orang (Cresswell 2014). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari buku-buku dan artikel-artikel jurnal.

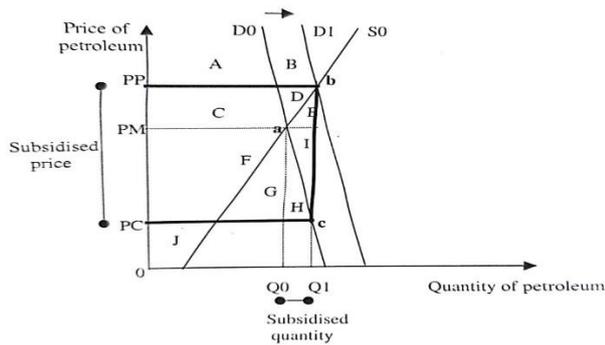
Hasil dan Pembahasan

Krisis ekonomi global yang melanda seluruh negara di dunia saat ini sebagai akibat dari Perang Rusia-Ukraina, telah membuat Pertamina kesulitan untuk menjaga produksi dan pasokan minyak bumi di pasar dalam negeri. Krisis ekonomi global ini telah memukul pasar-pasar keuangan dunia. Banyak mata uang negara-negara di dunia mengalami depresiasi tidak terkecuali Rupiah. Nilai tukar mata uang *Rupiah* mengalami pelemahan terhadap mata uang *Dollar* yang dipakai sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Sebagai akibatnya, barang-barang impor yang masuk ke Indonesia termasuk minyak bumi menjadi mahal. Pertamina harus menutupi selisih kenaikan harga ini supaya persediaan minyak bumi dalam negeri cukup dan tidak mengalami kekurangan.

Pemerintah memutuskan untuk memberikan subsidi untuk memastikan masyarakat mendapatkan minyak bumi dengan harga tetap terjangkau. Pemerintah menambah anggaran untuk mensubsidi minyak bumi agar persediaan di dalam negeri tetap ada dengan harga yang terjangkau. Melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022, pemerintah menaikkan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari awalnya Rp. 152 triliun pada APBN 2022 menjadi Rp. 502,4 triliun (Sihombing, 2022). Penambahan anggaran subsidi minyak bumi ini untuk menutupi selisih kurs yang terjadi sebagai akibat pelemahan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang internasional, *dollar*. Meskipun demikian, kenaikan harga minyak bumi dalam negeri tetap terjadi sebagai akibat dari berkurangnya jumlah pasokan dan meningkatnya permintaan minyak bumi dalam negeri.

Penerapan kebijakan subsidi minyak bumi ini dapat dijelaskan dengan menggunakan grafik sebagai berikut. Pada Grafik 1, harga konsumen minyak bumi (PC) berada di bawah harga pasar minyak bumi (PM). Harga konsumen sama dengan harga pasar dikurangi subsidi. Subsidi BBM menurunkan harga bagi konsumen. Di sisi lain, harga minyak bumi produsen berada di atas harga pasar (PM). Harga produsen (PP) naik karena subsidi. Harga produsen sama dengan harga pasar yang ditambah subsidi. Subsidi yang diberikan pemerintah adalah harga produsen (PP) dikurangi harga konsumen (PC). Apalagi, subsidi mendorong kuantitas minyak bumi di pasaran dalam negeri untuk kembali meningkat. Subsidi membuat kuantitas minyak bumi meningkat dari Q0 ke Q1. Dengan demikian, subsidi BBM diharapkan dapat menekan harga sehingga masyarakat miskin juga bisa mendapatkan BBM dan mendorong Pertamina untuk meningkatkan produksi BBM agar tidak terjadi kelangkaan pasokan di pasar. Namun, subsidi BBM di Indonesia mengalami inefisiensi yang ditunjukkan oleh bagian E+I pada Grafik 1 sebagai deadweight loss.

Graph 1: The petroleum subsidy



- PP = Harga produsen
- PM = Harga pasar
- PC = Harga konsumen
- D0 = Kurva permintaan sebelum subsidi
- D1 = Kurva permintaan setelah subsidi
- S0 = Kurva penawaran
- Q0 = Jumlah minyak sebelum subsidi
- Q1 = Jumlah minyak setelah subsidi
- a = Keseimbangan jumlah dan harga minyak sebelum subsidi
- b = Keseimbangan jumlah dan harga minyak setelah subsidi
- c = Keseimbangan jumlah dan harga setelah subsidi dengan harga konsumen

Table 1: Surplus Konsumen dan Surplus Produsen Sebelum dan Setelah Subsidi

	Sebelum Subsidi BBM	Setelah Subsidi BBM	Perubahan
Surplus Konsumen	A+C	A+B+C+D+F+G+H	+ (B+D+F+G+H)
Surplus Produsen	F+J	C+D+F+G+H+J	+ (C+D+G+H)
Pemerintah	None	-(C+D+E+F+G+H+I)	-(C+D+E+F+G+H+I)
Total surplus	A+C+F+J	A+B+C+D+F+G+H+J	+ (B+D+G+H)

$E + I = \text{Deadweight losses}$

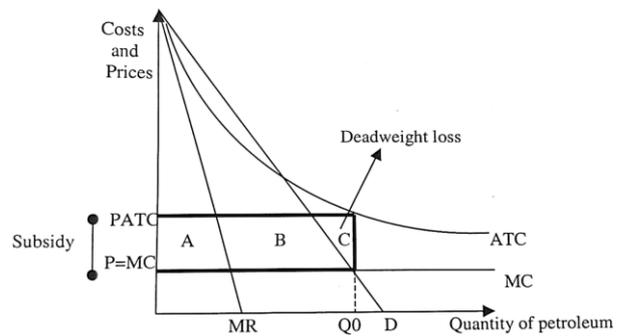
Subsidi minyak bumi tidak efisien untuk diterapkan karena *deadweight loss* (kehilangan bobot mati). *Deadweight loss* atau kelebihan beban sebagaimana dikatakan Abelson (2012), merupakan bagian dari transaksi berharga yang tidak diperoleh konsumen dan produsen bahkan oleh siapapun dalam ekonomi pasar. Bagian dari *deadweight loss* subsidi BBM yang tidak semuanya diterima baik oleh konsumen maupun produsen hanya memboroskan anggaran pemerintah. Semakin banyak subsidi minyak bumi yang diberikan pemerintah, semakin banyak *deadweight loss* atau kelebihan beban yang terbuang. Oleh karena itu, subsidi BBM hanya menambah pengeluaran pemerintah Indonesia yang bukan merupakan keseluruhan anggaran subsidi yang diperoleh baik oleh produsen maupun konsumen. Selain itu, subsidi pemerintah untuk minyak bumi juga memiliki beberapa efek baik terhadap produsen maupun konsumen, sebagai berikut:

Efek Subsidi Minyak terhadap Produsen

Produksi minyak bumi dimonopoli oleh Pertamina di Indonesia. Pertamina memiliki kewenangan untuk memproduksi sekaligus mendistribusikan minyak bumi di pasar domestik. Pertamina bertanggung jawab untuk mengatur pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) secara teknis kepada konsumen. Jadi, Pertamina memonopoli produksi dan distribusi minyak bumi di pasar domestik. Saat krisis ekonomi terjadi sebagai akibat perang Rusia-Ukraina, sulit bagi Pertamina untuk menjalankan fungsinya dalam memenuhi kebutuhan minyak bumi dalam negeri. Pemerintah memberikan subsidi yang merupakan bagian ABC pada Grafik 2 untuk mendorong Pertamina memproduksi minyak bumi lebih banyak. Pertamina mendapatkan surplus produsen yang merupakan bagian AB dari subsidi pemerintah. Pertamina bisa meningkatkan produksi minyak bumi karena subsidi pemerintah menutupi biaya produksi mereka. Pertamina sebagai produsen tunggal minyak bumi mengambil keuntungan lebih dari subsidi bagi konsumen yang meningkatkan keuntungan mereka. Namun, subsidi BBM tidak efisien seperti yang ditunjukkan pada bagian C sebagai *deadweight loss* pada Grafik 2. Pertamina

sebagai produsen tidak mendapatkan bagian ini dan juga konsumen.

Graph 2: The petroleum subsidy in the monopoly market of petroleum



- P = Price (Harga)
- ATC = Average Total Cost (Biaya Total Rata-Rata)
- PATC = Price equals to Average Total Cost (Harga sama dengan Biaya Total Rata-Rata)
- MC = Marginal Cost (Biaya Marjin)
- MR = Marginal Revenue (Pendapatan Marjin)

- D = Demand Curve (Kurva Permintaan)
- Q0 = Quantity of Petroleum (Kuantitas Minyak)
- AB = Consumer Surplus (Surplus Konsumen)
- ABC = Cost of Subsidy (Biaya Subsidi)
- C = Deadweight loss (Kehilangan Bobot Mati)

Efek Subsidi Minta terhadap Konsumen

Subsidi bahan bakar minyak (BBM) berdampak pada konsumen karena mereka bisa mendapatkan BBM dengan harga murah. Grafik 1 menunjukkan rendahnya harga BBM untuk konsumen (PC) berada di bawah harga pasar (PC) setelah disubsidi. Tabel 1 juga menunjukkan surplus yang diperoleh konsumen melalui subsidi BBM. Namun, subsidi BBM bisa merugikan konsumen melalui beberapa cara sebagai berikut:

The Petroleum Subsidy is not on Target to Support the Poor People

Intervensi pemerintah melalui subsidi BBM belum tepat sasaran untuk mendukung masyarakat miskin di Indonesia. Produsen meningkatkan produksi minyak bumi sehingga harga minyak bumi turun. Konsumen dapat membeli minyak bumi dengan harga murah. Namun, subsidi BBM tidak memberikan manfaat yang sama bagi konsumen. Subsidi dikemas dalam produk minyak bumi (Nurprianto, 2001:7). Semakin banyak konsumen membeli minyak bumi, semakin banyak pula konsumen yang memanfaatkan subsidi minyak bumi. Persoalannya, daya beli minyak bumi tidak merata di Indonesia. Orang kaya bisa membeli lebih banyak minyak daripada jumlah minyak yang bisa dibeli orang miskin. Selain itu, orang kaya dapat membeli lebih banyak minyak bumi untuk

mengoperasikan barang-barang mewah mereka seperti generator listrik dan mandi air panas dan untuk bisnis mereka seperti restoran kecil dan menengah. Sebaliknya, orang miskin tidak memiliki barang-barang mewah dan mereka menggunakan minyak bumi hanya untuk memasak dan menyalakan lentera untuk menerangi rumah mereka. Orang kaya mengkonsumsi lebih banyak minyak bumi daripada orang miskin. Jadi, tujuan subsidi BBM tidak maksimal untuk mendukung masyarakat miskin.

Menimbun Stok Minyak

Subsidi minyak bumi yang membuat harga menjadi murah menyebabkan masalah penimbunan minyak bumi. Subsidi membuat masalah menjadi produk yang lebih dicari karena selain minyak bumi merupakan produk pokok juga didapat dengan harga murah melalui subsidi. Masyarakat saling bersaing untuk mendapatkan BBM dengan harga bersubsidi. Orang kaya dapat membeli minyak bumi dalam jumlah besar dengan harga lebih rendah dan menyimpan minyak bumi untuk persediaan. Ini menyebabkan masalah penimbunan. Sebaliknya, orang miskin hanya mendapatkan minyak dalam jumlah terbatas karena mereka memiliki sedikit uang.

Scarcity of the Petroleum Stock in the Domestic Market

Subsidi minyak bumi menyebabkan kelangkaan stok minyak bumi di pasaran karena orang kaya bisa

menimbun minyak bumi. Lebih parah lagi ketika para penimbun menjual stok minyak secara ilegal ke luar negeri. Subsidi BBM membuat harga BBM di dalam negeri lebih murah dibandingkan dengan harga BBM di luar negeri. Hal ini mengakibatkan para penimbun menjual minyak bumi ke luar negeri dengan kapal asing yang melakukan transaksi di laut dengan harga minyak di luar negeri. Praktik para penimbun dalam menjual minyak bumi ke luar negeri memindahkan stok minyak bumi dari pasar domestik ke luar negeri. Banyaknya provinsi di Indonesia yang kekurangan stok BBM menyebabkan konsumen terbatas untuk membeli BBM bahkan konsumen harus mengantri. Hal ini menyebabkan kelangkaan stok minyak bumi di pasar domestik Indonesia.

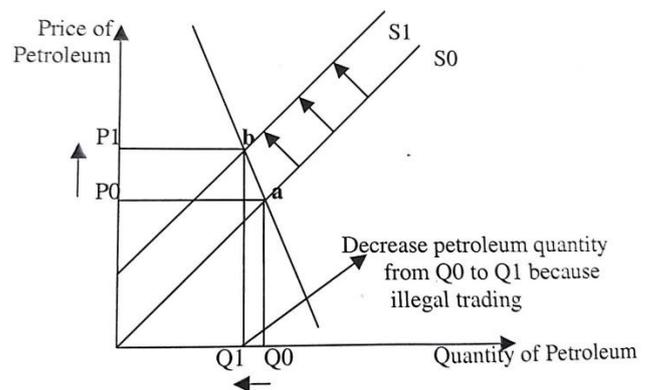
- Q0 = Quantity of petroleum before illegal trading (Kuantitas minyak sebelum perdagangan ilegal)
- Q1 = Quantity of petroleum after illegal trading (Kuantitas minyak setelah perdagangan ilegal)
- P0 = Price of petroleum before illegal trading (Harga minyak sebelum perdagangan ilegal)
- P1 = Price of petroleum after illegal trading (Harga minyak setelah perdagangan ilegal)
- S0 = Supply curve before illegal trading (Kurva penawaran sebelum perdagangan ilegal)
- S1 = Supply curve after illegal trading (Kurva penawaran setelah perdagangan ilegal)
- A = Equilibrium price before illegal trading (Keseimbangan harga sebelum perdagangan ilegal)
- B = Equilibrium price after illegal trading (Keseimbangan harga setelah perdagangan ilegal)

Grafik 3 menggambarkan bagaimana perdagangan ilegal minyak bumi di luar negeri mempengaruhi pasar minyak dalam negeri. Interval Q0 hingga Q1 menunjukkan kuantitas minyak bumi yang dijual ke luar negeri secara ilegal. Hal ini menyebabkan harga minyak bumi dalam negeri meningkat dari P0 menjadi P1.

Unstable Petroleum Price Domestically

Kelangkaan stok minyak bumi di pasar domestik menyebabkan kenaikan harganya. Kenaikan harga BBM berarti kebijakan subsidi BBM tidak lagi menguntungkan konsumen. Subsidi BBM dalam hal

Graph 3: The effect of illegal trading on the market



ini hanya menguntungkan produsen dan pemerintah memboroskan anggaran untuk rakyat miskin. Dawe mengatakan bahwa 'harus diingat juga bahwa sementara kegagalan pasar merupakan motivasi bagi intervensi pemerintah untuk menstabilkan harga komoditas, kegagalan pemerintah juga merupakan kemungkinan yang berbeda' (1993:100). Jadi, subsidi BBM memberikan dampak negatif bagi konsumen terutama masyarakat miskin.

Simple

Subsidi minyak bumi yang merupakan intervensi pemerintah di pasar bertujuan untuk menstabilkan harga minyak bumi dimana konsumen mendapatkan minyak bumi dan produsen dapat meningkatkan produksi minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Baik produsen maupun konsumen dapat memanfaatkan subsidi BBM. Konsumen memanfaatkan subsidi minyak bumi dengan harga murah dan produsen (Pertamina) memanfaatkan karena subsidi minyak bumi menutupi biaya produksi minyak bumi. Namun, subsidi minyak bumi tidak efisien disebabkan oleh kerugian bobot mati. Deadweight loss merupakan bagian dari subsidi minyak bumi yang merupakan pemborosan. Baik produsen maupun konsumen tidak mendapat bagian.

Subsidi tersebut memberikan harga BBM yang murah bagi konsumen dan menutupi biaya produksi Pertamina untuk memproduksi BBM. Namun dalam praktiknya, subsidi BBM tidak on track karena hanya menguntungkan konsumen kaya daripada konsumen miskin. Selain itu, subsidi minyak bumi menyebabkan kenaikan harga minyak bumi yang berasal dari penimbunan dan selanjutnya kelangkaan minyak bumi di pasar domestik.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa subsidi minyak bumi dari pemerintah harus direvisi karena

subsidi tersebut tidak efisien dan berdampak negatif yaitu menyebabkan kelangkaan minyak bumi dan menaikkan harga. Ini memperburuk situasi bagi orang miskin untuk mendapatkan pasokan minyak bumi. Apalagi, subsidi minyak bumi memboroskan pengeluaran pemerintah, sesuatu yang tidak terjangkau oleh Indonesia.

References

- Abelson, P. 2012. *Public Economics: Principles and Practice*, 3rd edition, McGraw-Hill, Sydney.
- Asian Pacific Energy Research Centre 2022. *APEC Energy Overview 2022*, APEC.
- Chelminski, K. 2018. Fossil fuel subsidy reform in Indonesia. In: Skovgaard, J, van Asselt, H (Eds.), *The Politics of Fossil Fuel Subsidies and their Reform*. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 193–211.
- CNBC Indonesia 2022. BPS: Ekspor Maret US\$ 26,5 Miliar, Melonjak 44,36%, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220418093502-4-332338/bps-ekspor-maret-us--265-miliar-melonjak-4436>, 6 Nov 2022.
- Creswell, J. W. 2014. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.), Sage Publication, California.
- Dawe, D.C. 1993. *Essay on Price Stabilization and the Macroeconomy in Low-Income Countries*, University Microfilms International, USA.
- Dennis, Allen 2016. Household welfare implications of fossil fuel subsidy reforms in developing countries, *Energy Policy*, 96 (2016) pp. 597-606.
- Gans, J.S., King, S.P. dan Mankiw, N.G. 2012. *Principles of Microeconomics*, 5th edition, Harcourt Brace, Sydney.
- Huili Zhang, Ran An dan Qinlin Zhong 2019. Anti-corruption, government subsidies, and investment efficiency, *China Journal of Accounting Research*, Vol. 12, Issue 1, March 2019, pp. 113-133
- Ichsan, M., Lockwood, M. dan Ramadhani, M. 2022. National oil companies and fossil fuel subsidy regimes in transition: The case of Indonesia, *The Extractive Industries and Society*, 11 (2022) 101104.
- Liadze, I., Macchiarelli, C., Mortimer-Lee, P., Juanino, P.S. 2022. *The Economic Costs of the Russia-Ukraine Conflict*, NIESR Policy Paper 32, Date: 2 March 2022, National Institute of Economic and Social Research, London.
- McTaggart, D., Findlay, C. and Parkin, M. 2012. *Economics*, 7th edition, Pearson, Sydney.
- Nurprianto, R. 2001. Inefisiensi Pertamina: karakteristik subsidi atau metode yang salah? (Inefficiency of Pertamina: characteristic of subsidy or wrong method?), *Pemeriksa* no. 8, Oktober-Nopember 2001, 6-7.
- Rahman, A., Dargusch, P., dan Wadley, D. 2021. The Political Economy of Oil Supply in Indonesia and the Implications for Renewable Energy Development, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 144 (2021) 111027.
- Sihombing, J.C. 2022. Kenaikan Harga BBM: Jahat atau Sepakat..???, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidempuan/baca-artikel/15373/Kenaikan-Harga-BBM-Jahat-atau-Sepakat.html>, 9 Nov 2022.
- World Bank 2009. *Global Economic Prospects 2009: Commodities at the Crossroads*. World Bank, Washington DC see pages 110 to 112.